

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adang & Anwar Yesmil, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Kemandirian dan kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*. Makalah (Disampaikan dalam seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN, Depkumham), Denpasar, 2003.
- Atmasasmita, Romli., SH., LL.M., 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung : Bina Cipta, 1996.
- BD Srimarsita, Et.al, *Posisi Kejaksaan dalam sistem Peradilan Pidana yang lebih Menjamin Perwujudan Keadilan dan Kepastian Hukum*, Puslitbang Kejaksaan Agung RI., Jakarta, 2000.
- Bahan Diklat, *Petunjuk Teknis Penuntutan*, Pusdiklat Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2010.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Effendy, Marwan., *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Friedman, Lawrence M., *American Law*, New York : WW. Norton and Company, 1984.
- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Edisi kedua, 2010.
- Hamzah, Andi & RM. Surahman., *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Hatta, M., “*Sistem Peradilan Pidana Terpadu, (Dalam konsepsi dan implementasi) Kapita Selecta*”, Yogyakarta : Galang Press, 2008.
- Irsan, Deddy., *Evaluasi Reformasi Kejaksaan, Problematika Penegakan Hukum*, Jakarta : Komisi Hukum Nasional RI, 2010.
- Kristiana, Yudi, *Menuju Kejaksaan Progresif, Studi tentang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta, 2009.

- NLRP, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), Jakarta, 2010.
- Osman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Grasindo, Jakarta, 1995.
- Prodjohamidjojo, Martiman., *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Reksodiputro, Mardjono., *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bab.7, *Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan*, (Kumpulan karangan buku ketiga), Jakarta : 2007
- , *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bab.1, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Kumpulan karangan buku kelima), Jakarta : 2007
- RM. Suharto, *Penuntutan Dalam Praktek Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Tresna, R., *Peradilan di Indonesia dari abad ke abad*, Pradya Paramita, Jakarta, 1978.
- Somi, Elektison., *Mengagas upaya mewujudkan peningkatan kinerja lembaga Kejaksaan sebagai cita reformasi Kejaksaan Republik Indonesia*, Problematika Penegakan Hukum, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Perkasa, Edisi I, Cetakan IV, Jakarta, 1994.
- Suharto, RM., *Penuntutan Dalam Praktek Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Waluyo, Bambang., *Pidana dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Yesmil Anwar & Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011.
- Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif, Studi tentang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta, 2009.

## **Undang-Undang dan Peraturan :**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2007

-----, Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 08 Tahun 1981 Tentang. Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

-----, Undang-Undang Nomor : 04 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jakarta : Sinar Grafika, 2004

-----, Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

-----, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 1999 tentang Susunan Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia Indonesia.

-----, Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tentang Susunan Organisasi Kejaksaan Tinggi

-----, Lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.Kep.074/J.A/7/1978, tanggal 17 Juli 1978

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta : Balai Pustaka, Cetakan 3, 1990.

Kejaksanaan Dalam Data Tahun 2006, Pusat Informasi Data dan Statistik Kriminal Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2007.

Kejaksaan Agung RI, Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Buku I-IV, Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1994

-----, Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus Tahun 2002-2005, Buku I-III, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2002

-----, *Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Buku I-IV*, Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1994.

-----, *Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus Tahun 2002-2005, Buku I-III*, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2002.

-----, *Studi tentang “Implementasi Kekuasaan Penuntutan di Negara Hukum Indonesia”*, Pusat Litbang Kejaksaan Agung R.I, Jakarta, 2008.

-----, *Kejaksaan Dalam Data Tahun 2015*, Pusat Informasi Data dan Statistik Kriminal Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2016.

SE-004/A/JA/09/2008 tanggal 23 September 2008.

#### **Wawancara :**

**Deddy Firmansyah, SH.** pada tanggal 3 Januari 2017, pukul 14.00 WIB, bertempat di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Semarang.

Freddy Runtu, SH., pada tanggal 3 Januari 2017, pukul 10.30 WIB, bertempat di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Semarang.

Sarwono, SH. M.Hum., tanggal 10 Oktober 2016 di Kantor Pengadilan Negeri Pekalongan.

Responden, Desember 2016 di kantor Kejaksaan Negeri Pekalongan.

-----, Responden dari Penuntut Umum yang diwawancarai Penulis pada sekitar bulan April 2013 di salah satu kantor Kejaksaan Negeri.

#### **Internet :**

<http://zulakrial.blogspot.com/2010/10/kemerdekaan-profesionalisme-jaksa-sebagai-penuntut-umum:analisis-terhadap-kebijakan-rencana-tuntutan>, diunduh pada Jumat, 25 Nopember 2016.

<http://www.detiknews.com/basrief-peniadaan-rentut-akan-dilakukan-secara-bertahap> diunduh pada Jumat, 25 Nopember 2016.

<http://www.hukumonline.com> diunduh pada Senin, 2 Januari 2017, jam 11: 00.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15445/andi-hamzah-hanya-indonesia-yang-punya-jenjang-rentut>.

<http://www.hukumpedia.com/elvi17/penegakan-profesionalisme-jaksa-melalui-independensi-dan-kode-etik-upaya-pemberdayaan-sumber-daya-manusia-di-kejaksaan-yang-berintegritas>, diunduh pada Senin 2 Januari 2017 jam 03.37.

<http://www.detikSport.com/Basrief-peniadaan-rentut-akan-dilakukan-secara-bertahap>.

<http://nasional.vivanews.com/news/read/200654-ma-dukung-kejaksaan-hapus-rencana-penuntutan>.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/kejaksaan-tetapkan-20-jenis-tindak-pidana-harus-melalui-rentut>.

[http://zulakrial.blogspot.com/2010/10/kemerdekaan-profesionalisme-jaksa\\_29.html](http://zulakrial.blogspot.com/2010/10/kemerdekaan-profesionalisme-jaksa_29.html).

<http://www.hukumonline.com/rencana-penuntutan-lestarikan-budaya-militer-di-kejaksaan>.

<http://www.kejaksaan.ri.go.id>.

<http://harianpelita.com/politik-dan-keamanan/tepat-rencana-penghapusan-prosedur-penuntutan>.

<http://www.suarapembaharuandialy-kasus-narkoba-jakbar-catatan-buruk-bagi-jaksa-agung>.

<http://www.forumkeadilanonline/cerita-lama-yang-berulang>.

<http://www.kejaksannegerijakartabarat.go.id>.